

Abstract

Public information disclosure is one of the important principles in realizing good governance and democracy. However, based on the results of the ranking by the Jambi Provincial Information Commission in 2023, the Jambi City KPU obtained the title “quite informative”, which shows that there are still challenges in implementing information disclosure. This study aims to explain public information disclosure at the Jambi City KPU. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection techniques used include direct interviews with relevant parties as well as analysis of relevant documentation to get an accurate picture. The results showed that public information disclosure at the Jambi City KPU had not been implemented properly because there were still several obstacles. The timeliness of information delivery has not been optimal, the completeness of information has also not been fully met. The reliability of information is maintained through a verification mechanism before publication, but the range of information dissemination is still limited, mainly due to the inactivity of the PPID website. Then on the accuracy indicator, the Jambi City KPU shows inaccuracies, mainly because the PPID website does not update data regularly. Thus, it raises doubts about the accuracy of the information presented, and this erodes public trust in the Jambi City KPU. The conclusion of this study is that the Jambi City KPU still faces challenges in optimizing public information disclosure. To increase transparency and accountability, it is necessary to improve the information management system, consistent data updates, and increase the capacity of human resource capabilities.

Keywords: *Public Information Disclosure, Jambi City KPU, Digital Era*

Intisari

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis. Namun, berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tahun 2023, KPU Kota Jambi memperoleh predikat "cukup informatif", yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterbukaan informasi publik pada KPU Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara langsung dengan pihak terkait serta analisis dokumentasi yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di KPU Kota Jambi belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat beberapa kendala. Ketepatan waktu penyampaian informasi belum optimal, kelengkapan informasi juga belum sepenuhnya terpenuhi. Keandalan informasi dijaga melalui mekanisme verifikasi sebelum publikasi, namun jangkauan penyebaran informasi masih terbatas, terutama karena ketidakaktifan website PPID. Kemudian pada indikator akurasi, KPU Kota Jambi menunjukkan ketidakakuratan, terutama karena website PPID tidak memperbarui data secara berkala. Sehingga, menimbulkan keraguan terhadap keakuratan informasi yang disajikan, dan hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap KPU Kota Jambi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa KPU Kota Jambi masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi keterbukaan informasi publik. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan peningkatan sistem pengelolaan informasi, pembaruan data yang konsisten, dan peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kota Jambi, Era Digital